



INDONESIA  
DEVELOPMENT  
FORUM

*Pathways to Tackle Regional Disparities across the Archipelago*

# MEMPERKUAT PEMERINTAH DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**DR. ASMAN ABNUR, M.Si**



# Regional Development is a general effort to reduce regional disparities

## PERAN PENTING PEMERINTAH DAERAH

1

### MENENTUKAN ARAH MASA DEPAN

Pemda memiliki peran untuk menentukan arah kemana tujuan pembangunan akan diwujudkan

2

### MERENCANAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemda memiliki peran untuk merencanakan pembangunan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

3

### MENGINISIASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pemda melaksanakan program-program pembangunan untuk membuka akses, memperkuat birokrasi, dan harus hadir dalam setiap kesempatan dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan inklusif/pemberdayaan masyarakat

4

### MELAKUKAN INOVASI- INOVASI/TEROBOSAN- TEROBOSAN

Pemda memiliki peran untuk mendorong inovasi untuk memberikan solusi permasalahan daerah

# MEMPERKUAT PEMERINTAH DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI

## FOKUS REFORMASI BIROKRASI

1

### AKUNTABILITAS KINERJA

Mendorong pemerintahan berorientasi hasil

2

### ZONA INTEGRITAS

Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui unit-unit percontohan

3

### SDM ASN

Mendorong penerapan sistem merit untuk mendukung kebutuhan SDM ASN dalam pembangunan daerah

4

### KELEMBAGAAN

Memperkuat kelembagaan instansi pemerintah untuk mendukung program pembangunan di daerah

5

### PELAYANAN PUBLIK

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

## Perubahan Pola Pikir/ *Mindset ASN*

- Money follow function → Money follow program
- Peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran
- Pemerintahan lebih berorientasi pada hasil. Hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
- Pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin ramah, mudah, murah, cepat, nyaman, aman, dan memiliki kepastian hukum
- ASN menjadi lebih memiliki jiwa kewirausahaan

o u t c o m e

# 1 MENDORONG PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

EFFECTIVE AND EFFICIENT (AA – B)

72 KEMENTERIAN/  
LEMBAGA  
29 PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI  
171 PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

INEFFECTIVE AND INEFFICIENT (CC – D)

10 KEMENTERIAN/  
LEMBAGA  
5 PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI  
312 PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

NILAI EFISIENSI DAN DAMPAK YANG DIHASILKAN DARI  
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) DI TAHUN 2017

Rp 41,15 Triliun  
(\$2,9 billion)

Rp 5,47 Triliun  
dari 7 K/L

Rp 35,68 Triliun  
dari 118 Pemerintah Daerah

1. Perumusan sasaran pembangunan lebih berorientasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Re-focusing Program/Kegiatan yang sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut;
3. Upaya cross-cutting program dan kegiatan sehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar-instansi;
4. Perubahan pendekatan: money follow function → money follow program

**Diberikan Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemerintah daerah yang nilai akuntabilitasnya tinggi**



## 2 MENDORONG PENERAPAN E-PERFORMANCE BUDGETING

**PP Nomor 17 Tahun 2017  
tentang  
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran**

Tahun 2017 telah dilakukan penyelarasan di seluruh Kementerian/Lembaga melalui PP 17/2017 dengan memanfaatkan Aplikasi Krisna. Untuk pemerintah daerah sedang dilakukan pendamping-an penerapan aplikasi SEPAK@T kepada sekitar 21 Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota bersama Kemen PANRB, BPPT, serta BPKP dan akan bertambah lagi sekitar 370 Pemerintah Daerah.

### PEMERINTAH PUSAT



Transparant

Web based

Secure

User friendly

Accountable

### RUANG LINGKUP

- ✓ Kolaborasi 3 Kementerian (Bappenas, Kemenkeu, KemenPAN RB)
- ✓ KRISNA versi 1.0 diluncurkan pada 17 April 2017
- ✓ Integrasi Sistem Aplikasi Perencanaan dan Penganggaran pada tahap perencanaan, money pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi;
- ✓ Kemudahan implementasi aplikasi bagi pengguna, pengurangan duplikasi proses input dan pengolahan data; kecepatan dan keterandalan data dan informasi.
- ✓ Telah digunakan oleh 87 K/L dan Mitra Kerja K/L di Bappenas dan Kemenkeu sejak tahun 2017 pada proses RKP-Renja-RKA-PK 2018.

### PEMERINTAH DAERAH



### DAMPAK UTAMA

1. Meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran dan fokus pada sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya keselarasan (program) antara yang direncanakan dengan yang dianggarkan.
3. Setiap sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah terkawal secara jelas pada kementerian/lembaga/organisasi perangkat daerah.
4. Mencegah program/kegiatan "Siluman".

# 3 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

109  
WBK \*

18  
WBBM \*\*

\*) WBK: Wilayah Bebas dari Korupsi

\*\*) WBBM: Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Saat ini telah terdapat 109 unit kerja WBK dan 18 unit kerja WBBM.

Terdiri atas:

- Polres
- Rumah Sakit
- Kantor Pelayanan Pajak
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
- Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Perijinan
- dan lain-lain

**Dampak yang diharapkan → Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik**



Pembentukan unit kerja percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi



mendorong dampak pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka dibentuk unit-unit pelayanan percontohan



Unit-unit pelayanan percontohan yang berhasil memenuhi kriteria integritas diberikan predikat sebagai unit pelayanan yang Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)



Unit pelayanan percontohan yang tidak hanya memenuhi kriteria integritas tetapi juga kriteria pelayanan yang baik diberi predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)



Tahun 2018, difokuskan di unit-unit penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung)



### Sistem Perencanaan yang Tepat Sasaran

- Disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di daerah
- Memerhatikan kemampuan keuangan daerah
- Memperhatikan kebutuhan daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T)

### Sistem Rekrutmen yang Efisien dan Transparan:

- Menerapkan sistem pendaftaran secara online
- Menerapkan sistem tes dengan Computer Assisted Test (CAT), yang secara langsung dapat diketahui hasilnya





**OUTCOME:**

**MENGHASILKAN PIMPINAN BIROKRASI (JPT) YANG KOMPETEN DAN BERINTEGRITAS**



**PROGRESS PELAKSANAAN PENGISIAN JPT SECARA TERBUKA  
DAN KOMPETITIF**

**Realisasi:**

- 2014 → 40 IP (25 K/L, 6 Prov, 9 Kab/Kota)
- 2015 → 128 IP (48 K/L, 5 Prov, 75 kab/Kota)
- 2016 → 333 IP (77 K/L, 18 Prov, 238 Kab/Kota)
- 2017 → 493 IP (77 K/L, 33 Prov, 383 Kab/Kota)

*\*pada prinsipnya seluruh instansi pemerintah sudah menerapkan pengisian JPT melalui seleksi terbuka dan kompetitif*



**PENGEMBANGAN PROFESIONALISME  
PEGAWAI**



**PROMOSI JPT SECARA TERBUKA  
DAN KOMPETITIF**



**PENEMPATAN PEGAWAI SESUAI DENGAN  
KOMPETENSI**



**REKRUTMEN CALON PNS  
TERBAIK**





**PENEMPATAN CPNS DARI  
SEKOLAH IKATAN DINAS TIDAK  
DITEMPATKAN DI DAERAH ASAL**

**IPDN  
1.921  
orang**

**STTD  
111  
orang**

**STAN  
5.236  
orang**

**STIS  
440  
orang**







## 7 MEMPERKUAT KELEMBAGAAN UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN DAERAH

### **Pembentukan Kantor Pertanahan**

*Untuk mewujudkan percepatan pelayanan program Penerbitan sertifikat dan layanan pertanahan*

### **Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama**

*Untuk mewujudkan percepatan pelayanan hukum kepada masyarakat*

### **Pembentukan Kantor Imigrasi di daerah**

*Untuk mewujudkan optimalisasi layanan imigrasi di daerah*

### **Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT Pemasarakatan**

*Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan lembaga pemasarakatan*

### **Penguatan kelembagaan institusi penegakan hukum (Penguatan Polres dan Polda, Penguatan BNN, Badan POM, Penguatan Kejaksaan Negeri, dll)**

*Untuk menciptakan kamtibmas yang kondusif untuk mendukung pembangunan daerah*

### **Pembentukan Akademi Komunitas**

*untuk mempersiapkan SDM dengan keahlian terapan sesuai dengan kebutuhan daerah*

### **Pembentukan Badan Otoritas Kepariwisataaan**

*(a.l: Badan Otoritas Borobudur, Badan Otoritas Danau Toba, Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Labuan Bajo)*

*Untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataaan*

### **Pembentukan/penguatan kelembagaan Bandara Baru atau pelabuhan**

*Untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi udara dan laut*

### **Pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA)**

*Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan urusan Agama di daerah*

### **Pembentukan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**

*Untuk mewujudkan percepatan pelayanan pendidikan tinggi*

# 8 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK



**Diberikan Dana Insentif Daerah (DID) bagi pemerintah daerah yang nilai inovasinya masuk dalam TOP 40**

One Agency  
One Inovasi

Kompetisi Inovasi

Replikasi Inovasi

Menghasilkan:

- Top 99
- Top 40

## PRESTASI INTERNASIONAL (United Nation Public Service Award - UNPSA)

- Kabupaten Aceh Singkil dengan inovasi “Kerja sama Dukun Beranak dengan Bidan pada Saat Melahirkan untuk Menurunkan Tingkat Kematian Ibu dan Anak” (2015, Juara 2)
- Kabupaten Sragen dengan inovasi “UPTPK: Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan” (2015, Juara 2)
- Kabupaten Teluk Bintuni dengan inovasi “Pengendalian Malaria Melalui Sistem EDAT” (2018, Juara 1)
- Provinsi Jawa Timur dengan inovasi “Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera)” (2018, Finalis)



# 9 MENGINISIASI PEMBANGUNAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH

Mengintegrasikan pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat



**SURABAYA**  
**205**  
Jenis Pelayanan  
• 194 Jenis Pelayanan Daerah  
• 11 Jenis Pelayanan Pusat  
Diresmikan  
**6 Oktober 2017**



**DKI JAKARTA**  
**328**  
Jenis Pelayanan  
• 269 Jenis Pelayanan Daerah  
• 59 Jenis Pelayanan Pusat  
Diresmikan  
**12 Oktober 2017**



**BATAM**  
**427**  
Jenis Pelayanan  
• 406 Jenis Pelayanan Daerah  
• 21 Jenis Pelayanan Pusat  
Diresmikan  
**14 Desember 2017**

**SELANJUTNYA**

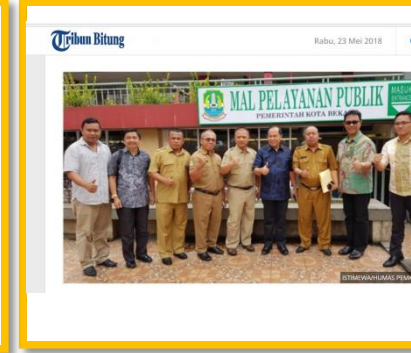
1. KAB. BELU
2. KAB. BADUNG
3. KAB. BANTUL
4. KAB. BANYUMAS
5. KAB. KULON PROGO
6. KAB. SIDOARJO
7. KAB. MANOKWARI
8. KOTA BANDA ACEH
9. KOTA PAYAKUMBUH
10. KOTA MAKASSAR
11. KOTA MOJOKERTO
12. KOTA PADANG
13. KOTA PALEMBANG
14. KOTA PEKANBARU
15. KOTA SAMARINDA
16. KOTA TANGERANG



**DENPASAR**  
**229**  
Jenis Pelayanan  
• 187 Jenis Pelayanan Daerah  
• 42 Jenis Pelayanan Pusat  
Diresmikan  
**12 Februari 2018**



**BANYUWANGI**  
**132**  
Jenis Pelayanan  
• 99 Jenis Pelayanan Daerah  
• 33 Jenis Pelayanan Pusat  
Diresmikan  
**6 Oktober 2017**



**BITUNG**  
**135**  
Jenis Pelayanan  
• 118 Jenis Pelayanan Daerah  
• 17 Jenis Pelayanan Pusat  
Soft Launching  
**5 April 2017**



**BEKASI**  
**29**  
Jenis Pelayanan  
• 17 Jenis Pelayanan Daerah  
• 7 Jenis Pelayanan Pusat  
• 5 Jenis Pelayanan BUMN/BUMD  
Diresmikan  
**12 Februari 2018**



**TOMOHON**  
**233**  
Yang terdiri dari :  
• 209 Jenis Pelayanan Daerah  
• 10 Jenis Pelayanan Pusat  
• 14 Jenis Pelayanan BUMN  
Diresmikan  
**21 April 2018**



**KARANGASEM**  
**160**  
JENIS PELAYANAN  
• 138 Jenis Pelayanan Daerah  
• 11 Jenis Pelayanan Pusat  
• 11 Jenis Pelayanan BUMN/BUMD  
Diresmikan: **22 Juni 2018**



# 9 MENGINISIASI PEMBANGUNAN MAL PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH



MPP DKI Jakarta



MPP Batam



MPP Bekasi



MPP Denpasar



MPP Surabaya



MPP Banyuwangi



MPP Tomohon



MPP Karangasem



MPP Bitung





## Pengertian

- Jaringan antar institusi yang mempunyai keinginan bersama membangun inovasi pelayanan publik
- Permenpan No 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik



## Stakeholder

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Universitas Negeri dan Swasta, Organisasi Non Pemerintah serta Mitra Pembangunan

## Mengapa itu sangat penting?

- ❖ Sebagai ajang *Transfer of Knowledge*
- ❖ Bagi yang sudah melaksanakan inovasi kepada yang akan melaksanakan inovasi
- ❖ Untuk menginformasikan kepada pimpinan daerah, pelayanan publik dan masyarakat tentang progres dalam pelayanan publik
- ❖ Untuk fasilitasi antara masyarakat dan penyedia pelayanan publik agar mereka dapat memberikan masukan yang berhubungan dengan inovasi pelayanan publik yang ada

## Hub Inovasi yang telah terbentuk:

1. Hub Jawa Timur
2. Hub Sumatera Selatan
3. Hub Sulawesi Selatan

## Langkah Konkret:

1. Sebagai pusat pembelajaran untuk wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur
2. Pengembangan jaringan informasi inovasi pelayanan publik
3. Pelaksanaan bimbingan bagi Provinsi, Kabupaten/Kota setempat sebagai Model Pengelolaan Inovasi

# 11 PENYELENGGARAAN THE INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE FORUM 2018

IPS Forum merupakan platform komunikasi dan interaksi bagi para pemimpin dan pengelola pelayanan publik untuk menciptakan, memperluas dan menggerakkan partisipasi publik.

## TUJUAN

1. Memberikan inspirasi kepada dunia atas inovasi-inovasi pelayanan publik di Indonesia
2. Wahana pembelajaran interaktif antarnegara dan intranegara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik
3. Meningkatkan kerjasama antara negara dalam percepatan reformasi birokrasi, pertukaran pengetahuan dan penguatan kepemimpinan di bidang pelayanan publik
4. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di berbagai sektor

## Tema:

**Expanding and Improving Service Delivery through Public Engagement**

## Rangkaian Acara:

- Pameran Inovasi Pelayanan Publik dari 100-150 innovator dari dalam dan luar negeri.
- Seminar dengan Pembicara berasal dari luar negeri dan dalam negeri baik dari kalangan pemerintah, donor, organisasi masyarakat sipil, *entrepreneur*, peneliti, dan akademisi.

## Peserta:

1. Para pemimpin setingkat menteri
2. Gubernur, bupati, dan walikota
3. Perwakilan dari mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, kementerian/lembaga, dan pengusaha
4. Masyarakat Umum
5. Media

Diperkirakan sebanyak 5.000-10.000 orang  
menghadiri IPS Forum

**7 – 8 November 2018**  
**JCC Senayan, Jakarta**



**KEBERHASILAN  
PENGUATAN PEMERINTAH DAERAH DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH TERLETAK PADA  
PIMPINAN DAERAH**





# TERIMA KASIH



**ASIAN GAMES | 2018**  
Jakarta Palembang

